



Jurnal BADATI

Vol 5 No 2 November 2023

P-ISSN : 1907 – 5340

E-ISSN : 2722 - 3248

Hal. : 15-26

PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN AIMAS KABUPATEN SORONG

**Farida Kalami¹, Ratna Rosmauli Pakpahan²,
Arce Yulita Ferdinandus³, Susana Magdalena Welly Muskita⁴**

¹ Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Victory Sorong

Email : faridakalami@gmail.com

² Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Victory Sorong

Email : ratnarosmauli@gmail.com

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Vicory Sorong

Email : arceferdinandus@gmail.com

⁴ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Vicory Sorong

Email : muskitasusan@gmail.com

Abstract

The government's role in encouraging community participation is very important for the smooth running of development. To realize community empowerment, prosperity and independence, it needs to be supported by participatory development management. In government settings, honest, open and responsible government behavior is required, while in community settings mechanisms need to be developed that provide opportunities for community participation in the decision-making process and implementation of empowerment programs for the common good. Community empowerment is a process where the community is supported so that it is able to improve its welfare independently. In other words, community empowerment is a process of increasing the ability and attitude of community independence. More specifically, this research wants to look at the role of sub-district government in empowering the community of Aimas sub-district, Sorong district. This research uses qualitative research methods using data collection steps and through observation, interviews and documentation. The results of this research are that the role of sub-district government in empowering the community of Aimas sub-district, Sorong Regency is divided into four roles,

namely human development, business development, environmental development and institutional development. This role has been implemented to the maximum extent possible so that there is community participation, even though not everyone is actively involved, apart from that, the results of this research also want to explain the inhibiting factors in carrying out the role of sub-district government in empowering the community of Aimas sub-district, Sorong Regency, namely human resources (community and sub-district employees) which is still less active and lacks supporting infrastructure such as laptops and printers.

Keywords: Government Role; Community empowerment; Human Development; Business Development; Environmental Development and Institutional Development

Abstrak

Peranan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sangat penting demi kelancaran pembangunan. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemberdayaan untuk kepentingan bersama. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya dengan mandiri. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Lebih spesifik dalam penelitian ini mau melihat tentang peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan aimas kabupaten sorong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah pengumpulan data dan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan aimas kabupaten sorong terbagi dalam empat peran yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan. Peran tersebut sudah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin sehingga adanya partisipasi masyarakat sekalipun belum semua terlibat aktif, selain itu hasil penelitian ini juga mau memaparkan faktor penghambat dalam melaksanakan peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan aimas kabupaten sorong yaitu dari sumber daya manusia (masyarakat dan pegawai kelurahan) yang masih kurang aktif serta kurangnya sarana prasarana penunjang seperti laptop dan printer.

Kata kunci: Peran Pemerintah; Pemberdayaan Masyarakat; Bina Manusia; Bina Usaha; Bina Lingkungan dan Bina Kelembagaan

PENDAHULUAN

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan, mengontrol lingkungannya dan dapat memenuhi keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya dengan mandiri. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan, dari sisi inilah masyarakat difasilitasi untuk mengkaji kebutuhan, masalah serta peluang pembangunan mereka sendiri.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan dijelaskan bahwa Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan paradigma pemberdayaan sangat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dengan berlandaskan prinsip pengelolaan pembangunan yang partisipatif, pada lingkup pemerintah menghadirkan pemerintahan yang jujur, adil, demokratis dan bertanggung jawab begitupun pada tatanan masyarakat mereka dilibatkan dalam dalam proses pembangunan seperti pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat lokal, sehingga masyarakat mampu memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan.

Salah satu peranan penting pemerintah desa atau kelurahan yaitu dapat menjalankan fungsinya memberdayakan masyarakat. Namun secara umum dalam kenyataannya menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dimana penilaian kinerja pemberdayaan pemerintah pada masyarakat terkesan sebagai formalitas belaka, tidak melibatkan masyarakat sehingga

masyarakat menerima begitu saja pembangunan desa yang dijalankan sehingga sumber daya mereka tidak berkembang, Musrenbang desa atau kelurahan sebagai bagian pemberdayaan sumber daya masyarakat hanya sekedar tuntutan tugas semata. Pemerintah desa harus mempunyai peranan yang sangat penting terhadap akselerasi pelaksanaan atau implementasi pada proses pembangunan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat akan terlaksana dengan baik bila peran pemerintah serta masyarakat dan partisipasinya juga baik. Oleh karena itu peranan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sangat penting demi kelancaran pembangunan. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemberdayaan untuk kepentingan bersama

KAJIAN LITERATUR

Adapun dalam penelitian ini, konsep yang dimaksud antara lain: konsep peran, konsep pemerintah dan pemerintah kelurahan, dan konsep pemberdayaan masyarakat. Peran. Menurut Poerwodarminta (1995: 571) “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah (Sri Soemantri, 1976: 17) sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (continue) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki (Utrecht, 1986: 28).

Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jawatan atau aparatur dalam susunan politik (Muhammad Yamin, 1982:112).

Pemerintah Kelurahan adalah pemerintah yang membawahi pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Konsep pemberdayaan, menurut Priyono dan Pranarka (1996), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran faktual dengan argument yang tepat.

Adapun lokasi yang ditentukan dalam pelaksanaan penelitian terhadap peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu di Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong.

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Wawancara Mendalam (indep interview); Penelitian Lapangan (field research); Penelitian Kepustakaan (Library research); dan Dokumentasi.

Data analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif, yaitu bersifat menggambarkan temuan hasil penelitian secara utuh dengan menggunakan dasar-dasar teori yang ada. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengambilan data, kemudian data dari hasil wawancara dan observasi kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan kemudian disajikan ke hasil penelitian. Penyajian data dalam bentuk tabel, skema, grafik, maupun dalam bentuk narasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Kelurahan sebagai bina manusia dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Bina manusia yang dilakukan di kelurahan Aimas Kabupaten Sorong yaitu berupa penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi program-program pemerintah kepada masyarakat setempat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Lurah Mathen Osok selaku Narasumber yang mengatakan bahwa :

“Salah satu bentuk bina manusia yang kami lakukan di kelurahan aimas ini, eee ada penyuluhan iya penyuluhan dari orang kesehatan untuk masyarakat sini, iya penyuluhan ini mereka buat saat posyandu yang dilakukan setiap 1 kali dalam 1 bulan..”

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber tersebut mau menyampaikan bahwa salah satu bentuk bina manusia dalam bentuk penyuluhan di bidang kesehatan yang dilakukan dalam kegiatan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) di kelurahan Aimas. Kegiatan posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) di kelurahan Aimas di lakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Selain penyuluhan-penyuluhan dibidang kesehatan juga ada penyuluhan-penyuluhan di bidang pertanian untuk kelompok tani. Mengingat warga masyarakat kelurahan Aimas bermata pencaharian petani sehingga penyuluha tentang pertanian untuk kelompok tani juga

dilakukan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh narasumber Bapak Ahmat Sayuti (Sekretaris) yang mengatakan bahwa :

“Penyuluhan bidang kesehatan, juga bidang pertanian ada, karena masyarakat kita kan bertani juga ada, sehingga penyuluhan kelompok tani sangat membantu pekerjaan mereka juga... kami kerjasama dengan bidang pertanian untuk melakukan penyuluhan tentang pertanian begitu lah.”

2. Peran Pemerintah Kelurahan sebagai bina usaha dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong Bina usaha yang dilakukan oleh kelurahan Aimas kepada masyarakat setempat yaitu adanya bantuan dari dinas sosial yang disalurkan melalui kelurahan kepada masyarakat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh narasumber Ibu Yuni Induk (Kepala Seksi Kesmas) yang mengatakn bahwa :

“Bantuan dari Dinas Sosial yang disalurkan untuk masyarakat di Kelurahan Aimas dalam bentuk pembagian, pemberian sembako.”

Selain bantuan yang diberikan dalam bentuk sembako sebagai bina usaha, terdapat juga bina usaha lainnya yaitu adanya pemberian modal atau uang untuk usaha masyarakat serta sarana yang diperlukan dalam membuka usaha masyarakat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber sebagai berikut. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber Bapak Mathen Osok (Kepala Lurah) yang mengatakan bahwa :

“Untuk bantuan usaha, iya benar kami memberikan uang atau modal untuk masyarakat yang mau berusaha, uang dan modal inilah yang bisa dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan usahanya.... karena kami kadang tidak tau apa yang mereka perlu untuk usaha mereka sehingga diberikan bantuan dalam bentuk modal atau uang.”

Bantuan yang diberikan ternyata tidak hanya dalam bentuk uang atau modal, tetapi juga dalam bentuk bantuan sarana penunjang usaha. Hal ini seperti yang disampaikan oleh narasumber Bapak Ahmat Sayuti (Sekretaris Lurah) yang mengatakan bahwa :

“Ada juga bantuan kayak gerobak itu, eh kontainer kecil itu untuk masyarakat.. mereka bisa berjualan di situ.. gerobak yang kita berikan itu ada sekitar 5 buah.”

Bantuan yang diberikan oleh kelurahan kepada masyarakat telah dilakukan baik dalam bentuk bantuan sembako, uang atau modal dan alat atau sarana untuk menunjang usaha yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan Aimas. Bantuan tersebut merupakan bagian dari bina Usaha.

3. Peran Pemerintah Kelurahan sebagai bina lingkungan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong Lingkungan binaan atau lingkungan terbangun adalah suatu lingkungan yang ditandai dengan dominasi struktur buatan manusia atau dengan kata lain adalah lingkungan hidup alamiah yang sudah di dominasi oleh kehadiran manusia. Sehingga untuk mengetahui program pemerintah dalam pemberdayaan Masyarakat terkait dengan bina lingkungan di Kelurahan Aimas Kabupaten Sorong, peneliti mendapat informasi dari hasil wawancara dengan Bapak Ahmat Sayuti (Sekretaris Lurah) yang mengatakan bahwa :

“Setiap hari jumat kami menghimbau masyarakat untuk melakukan kerja bakti, selain itu juga kami menurunkan beberapa pegawai kelurahan ke setiap RT untuk melihat secara langsung kegiatan kerjabakti atau biasa di sebut jumat bersi.”

Selain melaksanakan kerja bakti atau jumat bersih di lingkungan kelurahan Aimas, peran pemerintah kelurahan dalam bina lingkungan juga memberikan atau menyediakan tempat-tempat sampah gratis kepada masyarakat Kelurahan Aimas. Hal ini seperti yang

disampaikan oleh narasumber Ibu Sonya Kalagison (kepala seksi Pembangunan) yang mengatakan bahwa :

“Kami juga memberikan tempat-tempat sampah secara gratis kepada Masyarakat kelurahan aimas, dimana kami melibatkan setiap RT untuk dapat menghimbau warganya agar dapat mengikuti kegiatan ini”

Bina lingkungan juga menjadi program yang sudah dijalankan di Kelurahan Aimas Kabupaten Sorong, program tersebut sudah berjalan dengan maksimal.

4. Peran Pemerintah Kelurahan sebagai bina kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong Bina kelembagaan di Kelurahan Aimas sendiri memiliki mitra kerja yaitu Lembaga Masyarakat Adat Malamoi yang menjadi program kelurahan aimas kabupaten sorong dalam hal pelepasan tanah adat. Bina kelembagaan menjadi salah satu unsur penting di Kelurahan Aimas Kabupaten Sorong, karena memiliki peranan yang berkaitan dengan pelepasan tanah adat sehingga sangat membantu masyarakat yang sedang bermasalah dengan tanah adat. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Marthen Osok (Kepala Kelurahan) yang mengatakan bahwa :

“Iya benar, kami kebetulan punya mitra yaitu Lembaga Adat yang merupakan lembaga atau organisasi yang ada di lingkungan kelurahan aimas yang memerlukan pendampingan dan juga pembinaan...eeh karena punya mitra lembaga ini kami juga sangat terbantu mengenai kalau ada masalah tanah di masyarakat sekitar.”

Hasil wawancara dengan narasumber diatas mau menjelaskan bahwa kemitraan dilakukan dengan Lembaga Masyarakat Adat, dan dengan adanya Lembaga ini adanya saling membantu yaitu lembaga di bina oleh Kelurahan, dan ketika ada masalah terkait tanah adat di masyarakat sekitar maka lembaga adat dapat membantu.

5. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi peran Pemerintah Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong.

Faktor penghambat yang mempengaruhi peran pemerintah kelurahan Aimas dalam pemberdayaan masyarakat di kelurahan aimas yaitu Sumber Daya Manusia yang masih kurang aktif dan kurang terlibat. Hal ini dapat dijelaskan melalui hasil wawancara dengan narasumber Brondina Putong yang mengatakan bahwa :

“Kami sudah melakukan berbagai kegiatan dalam bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan, namun terkadang masih ada sumber daya manusia yang tidak mau terlibat, sumber daya manusia di sini bukan hanya dari masyarakat, ttapi juga dari pihak pelaksana peran yaitu dari pegawai kantor kelurahan sendiri masih ada pegawai yang tidak terlibat atau kurang terlibat ya dalam kegiatan yang dilakukan kelurahan.”

Hasil wawancara dengan narasumber diatas mau menjelaskan bahwa salah satu faktor penghambat yang mempengaruhi peran kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di kelurahan aimas yaitu dari sumber daya manusianya, yang terdiri dari masyarakat juga dari pegawai kelurahan aimas. Dari pemaparan beberapa narasumber, maka dapat ditegaskan bahwa masih terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi peran Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Aimas, yaitu Sumber daya manusia (masyarakat dan pegawai yang kurang aktif) dan sarana prasarana penunjang (perangkat komputer/laptop dan printer).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dipaparkan maka dapat disimpulkan:

1. Peran Pemerintah Kelurahan sebagai bina manusia dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Aimas Distrik Aimas

Kabupaten Sorong dilakukan dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan bidang kesehatan dan pertanian, serta sosialisasi program-program pemerintah Kelurahan untuk masyarakat sekitar.

2. Peran Pemerintah Kelurahan sebagai bina usaha dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan oleh Dinas Sosial melalui Kelurahan Aimas dalam bentuk sembako; selain itu bentuk bina usaha yang dilakukan Kelurahan Aimas yaitu pemberian dana atau modal usaha serta penyediaan sarana penunjang seperti gerobak jualan atau kontainer kecil.
3. Peran Pemerintah Kelurahan sebagai bina lingkungan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong dilakukan dalam bentuk melaksanakan kerja bakti atau jumat bersih dan penyediaan atau pengadaan tempat-tempat sampah gratis untuk warga sekitar.
4. Peran Pemerintah Kelurahan sebagai bina kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong yaitu dengan memberikan pendampingan terhadap mitra Lembaga Masyarakat Adat Malamoi dalam penyelesaian permasalahan masyarakat sekitar.
5. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi peran Pemerintah Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong yaitu Sumber daya manusia (pegawai dan masyarakat) yang kurang aktif, serta sarana prasarana penunjang seperti komputer atau laptop serta perangkat printer yang masih sangat kurang memadai.

REFERENSI

- Mohammad Yamin, 1982. Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta:Ghalia Indonesia
- Poerwadarminta, W.J.S. 1995. Kamus Umum Bahasa Indonesia.Jakarta: PT.Balai Pustaka
- Prijono,O.S., Pranarka,A.M.W. 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. CSIS. Jakarta.
- Sri Soemantri, Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara Asean, Tarsito, Bandung, 1976
- Utrecht, E, 1986, Hukum Pidana I, Pustaka Tirta mas, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan